



## Kecermatan Penggunaan Satuan Lingual Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007

Margiani ✉, Bambang Hartono, Imam Baehaqie

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Februari 2017  
Disetujui Maret 2017  
Dipublikasikan  
November 2017

*Keywords:*  
unit lingual; word choice;  
sentence effectiveness; unity  
of the article; local  
regulations

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecermatan penggunaan satuan lingual dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan berupa teori analisis wacana, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa penggalan wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian informal. Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, ketidaktepatan pilihan kata terdiri atas: penggunaan kosakata tidak baku, penggunaan kata yang boros, penggunaan kata yang tidak tepat, penggunaan konjungsi korelatif yang salah, dan penggunaan verba berpreposisi yang salah. *Kedua*, ketidakefektifan kalimat terdiri atas: ketidaklengkapan, ketidakparalelan, ketidakhematan, ketidakpaduan, dan ketidaklogisan. *Ketiga*, kesatuan pasal-pasal.

### Abstract

*This study aims to identify the precision of the use of force in the discourse lingual Regional Regulation of Semarang in 2007. The approach used in this research is the theoretical approaches and methodological approaches. Theoretical approaches used in the form of discourse theory, whereas the methodological approaches used in the form of qualitative descriptive. This research data in the form of a fragment of discourse Regional Regulation of Semarang in 2007. Data collection method used is the method see, then proceed with the techniques noted. The analytical method used is descriptive method. Method of presenting the results of data analysis in this study is an informal pretentation. The conclusions of this study are as follows. First, inaccurate word choice consists of: the use of non-standard vocabulary, use of the word wasteful, improper use of words, the use of correlative conjunctions are wrong, and the use of verbs prepositional wrong. Secondly, the ineffectiveness, unparallel, unefficient, incoherence, and illogical. Third, the unity of the articles.*

© 2017 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:  
Gedung B1 Lantai 1 FBS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: margiani99@yahoo.com

ISSN 2252-6315

## PENDAHULUAN

Bahasa adalah suatu alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi terhadap sesama. Berdasarkan media yang digunakan, ragam bahasa dibedakan atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Penggunaan ragam bahasa tulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti ketepatan pilihan kata, keefektifan kalimat, dan aspek tata bahasa. Berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan, ragam bahasa dapat dibedakan atas bidang-bidang ilmu, misalnya ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, dan ragam bahasa hukum.

Bahasa hukum memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan ragam bahasa lain. Karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah, komposisi, gaya bahasa yang khusus, dan kandungan makna yang khusus. Bahasa hukum terkadang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari bahasa hukum harus berdampingan dengan mempelajari bahasa Indonesia yang umum agar saling mengisi kekurangan satu sama lain dan dapat saling mengerti antara satu dan yang lain.

Menurut Rahardjo (1991:83-84), peraturan perundang-undangan memiliki ciri yang harus dimiliki, yaitu bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas, bersifat universal karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya, dan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan daerah pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Penulisan peraturan daerah menjadi sangat menarik bagi peneliti karena bahasa dalam perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Padahal, dalam penulisan rancangan perda tidak melibatkan ahli bahasa. Oleh karena itu, peraturan peraturan

perundang-undangan masih kurang cermat dalam penulisannya.

Peraturan daerah di Indonesia sangat banyak. Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 karena peneliti menduga masih terdapat ketidakcermatan pada ketepatan pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal dalam wacana tersebut.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana. Adapun pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati, pendapat tersebut menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009:4).

Data dalam penelitian ini berupa penggalan wacana dalam wacana Peraturan daerah Kota Semarang Tahun 2007 yang diduga masih kurang cermat. Sumber data dalam penelitian ini berupa wacana Peraturan daerah Kota Semarang tahun 2007. Menurut Hartono (2012:6) sebuah wacana merupakan unit bahasa yang terikat oleh suatu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari segi bentuk dan segi maknanya. Oleh karena itu, sebuah wacana selalu direalisasikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat. Sebuah wacana dapat ditemukan dalam bentuk sebuah kalimat, bahkan dapat berupa sebuah frase atau kata.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode simak yang dilakukan dengan cara menyimak penggalan wacana. Menurut Sudaryanto (1993:132) metode simak adalah metode yang digunakan dalam penelitian bahasa dengan cara menyimak penggunaan bahasa pada objek yang akan

diteliti. Metode simak dipilih peneliti karena objek yang diteliti berupa bahasa yang sifatnya teks. Metode simak kemudian dilanjutkan dengan teknik catat yang berarti peneliti mencatat data yang dinilai tepat dalam kajian analisis konjungsi wacana pada sebuah kartu data.

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memerikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian (Arikunto dalam Mulyana 2005:83). Dengan metode ini, data yang diperoleh kemudian dibuat klasifikasi. Klasifikasi ini berupa ketepatan pemilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal. Hasil klasifikasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan daerah dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perancangan dan penulisan peraturan daerah harus sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Namun, dalam penulisan rancangan perda tidak melibatkan ahli bahasa. Oleh karena itu, peraturan daerah masih kurang cermat dalam penulisan. Peraturan daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah *Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007*. Hasil analisisnya adalah 1) ketepatan pilihan kata meliputi a) penggunaan kosakata tidak baku, b) penulisan kata yang boros, c) penggunaan kata yang tidak tepat, d) penggunaan konjungsi korelatif yang salah, dan e) penggunaan verba berpreposisi yang salah; 2) keefektifan kalimat meliputi a) ketidaklengkapan, b) ketidakparalelan, c) ketidakhematan, d) ketidakpaduan, dan e) ketidaklogisan; 3) kesatuan pasal-pasal.

### Ketidaktepatan Pilihan Kata

Ketidaktepatan pilihan kata pada penelitian ini mencakup: a) penggunaan kata tidak baku; b) penggunaan kata yang boros; c) penggunaan kata yang tidak tepat; d)

penggunaan konjungsi korelatif yang tidak tepat; e) penggunaan verba berpreposisi yang salah.

### Penggunaan Kosakata Tidak Baku

Indikator ketidaktepatan pilihan kata yang pertama adalah penggunaan kosakata tidak baku. Ketidaktepatan kosakata dapat dilihat dari **bentuk kata tidak baku**.

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh **ijin** dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

(Data 19/Nomor 1 Pasal 24)

Pada penggalan wacana (1) penulisan kata **ijin** tidak baku, kata bakunya adalah **izin**.

### Penggunaan Kata yang Boros

Indikator ketidaktepatan pilihan kata kedua adalah penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna sama. Kesalahan penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna sama di antaranya **penggunaan kata bermakna jamak ganda**.

- (2) Lampiran XI **Daftar kegiatan-kegiatan** tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

Data 302/Nomor 2 Pasal 5)

Pada penggalan wacana (2) terdapat kemubaziran kata. Kata **daftar** dalam bahasa Indonesia sudah mengandung makna jamak. Begitu juga dengan bentuk ulang **kegiatan-kegiatan**. Oleh karena itu, agar pilihan kata menjadi tepat sebaiknya ditulis **daftar kegiatan** atau **kegiatan-kegiatan**.

### Penggunaan Kata yang Tidak Tepat

Indikator ketidaktepatan pilihan kata ketiga adalah penggunaan kata yang tidak tepat.

- (3) RPJMD merupakan penjabaran **dari** visi, misi, dan program Walikota

memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dengan mencantumkan pagu indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi.

(Data 323/Nomor 9 Pasal 5)

Pada penggalan wacana (3) kata **dari** tidak tepat digunakan karena menunjukkan fungsi arah asal.

#### **Penggunaan Konjungsi Korelatif yang Salah**

Indikator ketidaktepatan pilihan kata keempat adalah penggunaan konjungsi korelatif yang salah. Pasangan konjungsi korelatif yang benar di antaranya **baik... maupun...**

- (4) Tenaga pendidik dan kependidikan **baik** yang berstatus PNS **dan** tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Data 325/Nomor 1 Pasal 49)

Pada penggalan wacana (4) kata **baik** tidak berpasangan seharusnya berpasangan dengan kata **maupun**.

#### **Penggunaan Verba Berpreposisi yang Salah**

Indikator ketidaktepatan pilihan kata kelima adalah penggunaan verba berpreposisi yang salah. Pasangan verba berpreposisi yang benar di antaranya **terdiri atas**.

- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 **terdiri dari**:...

(Data 398/Nomor 8 Pasal 2)

Pada penggalan wacana (5) kata **terdiri dari** tidak baku, kata bakunya adalah **terdiri atas**.

#### **Ketidakefektifan Kalimat**

Ketidakefektifan kalimat pada penelitian ini mencakupi: 1) kelengkapan; 2) kesejajaran; 3) kehematan; 4) kepaduan; dan 5) kelogisan.

#### **Ketidaklengkapan**

Indikator ketidakefektifan kalimat yang pertama adalah ketidaklengkapan. Ketidaklengkapan yang dimaksud adalah **subjek tidak ada**.

- (6) Agar setiap orang mengetahuinya, **memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang**.

(Data 427/Nomor 1 Pasal 72)

Penggalan wacana (11) tidak memiliki subjek.

#### **Ketidakparalelan**

Indikator ketidakefektifan kalimat yang kedua adalah ketidakparalelan. Ketidakparalelan tersebut karena **menggunakan bentuk imbuhan yang berbeda dalam satu kalimat**.

- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya **membaca, menulis** dan **berhitung** bagi segenap warga masyarakat.

(Data 479/Nomor 1 Pasal 4)

Penggalan wacana (7) tidak memiliki kriteria kesejajaran karena penggunaan imbuhan yang berbeda dalam satu kalimat.

#### **Ketidakhematan**

Indikator ketidakefektifan kalimat yang ketiga adalah ketidakhematan. Ketidakhematan tersebut meliputi **superordinat hiponimi**.

- (8) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui **proses pembelajaran** yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.

(Data 486/Nomor 1 Pasal 1)

Penggalan wacana (8) tidak memiliki kriteria kehematan karena kata **pembelajaran** sudah mencakupi makna **proses**.

**Ketidakpaduan**

Indikator ketidakefektifan kalimat yang keempat adalah ketidakpaduan. Ketidakpaduan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah **kalimat rancu**.

- (9) **Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.**

(Data 530/Nomor 1 Pasal 13)

Penggalan wacana (9) kalimat tersebut rancu. Tafsiran pertama adalah daftar ulang tanpa dipungut biaya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus. Tafsiran kedua adalah daftar ulang dipungut biaya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas, sementara peserta didik yang tidak lulus diberlakukan daftar ulang tanpa dipungut biaya.

**Ketidaklogisan**

Indikator ketidakefektifan kalimat yang keenam adalah ketidaklogisan. Ketidaklogisan dalam penelitian ini adalah **kalimat tidak masuk akal**.

- (10) Pemerintah Daerah **memfasilitasi terselenggaranya** satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(Data 533/Nomor 1 Pasal 4)

Penggalan wacana (10) terdapat kata yang tidak logis. Kata **terselenggara** berarti **sudah**

**diselenggarakan**. Jika sudah diselenggarakan maka tidak perlu difasilitasi.

**Ketidaksatuan Pasal-Pasal**

Indikator selanjutnya adalah ketidaksatuan pasal-pasal. Ketidaksatuan pasal-pasal mencakupi **ketidaksatuan pasal-pasal** dan **ketidaksejajaran pasal-pasal**.

- (11) Penutupan satuan pendidikan

(1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.

(2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi syarat pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3) **Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.**

Penggalan wacana (11) membahas tentang penutupan satuan pendidikan, tetapi poin ketiga membahas tentang perubahan nama pada satuan pendidikan.

**Tabel 1.** Indikator Ketidacermatan Satuan Lingual

Jenis Kecermatan Berbahasa	Jumlah	Tidak Cermat	Kurang Cermat	Cermat
<b>1. Ketidaktepatan pilihan kata</b>				
Penggunaan kosakata tidak baku	375	V		
Penggunaan Kata yang Boros	2			V
Penggunaan Kata yang Tidak Tepat	20		V	
Penggunaan	8			V

Konjungsi  
Korelatif yang  
Salah  
penggunaan  
verba  
berpreposisi  
yang salah

Tahun 2007 ditemukan (14) data.

### 2. Keefektifan kalimat

Ketidaklengkapan	56		V
Ketidakparalelan	7		V
Ketidakhematan	44	V	
ketidakpaduan	8		V
ketidaklogisan	20		V

### 3. Kesatuan pasal

kesatuan pasal	14		V
----------------	----	--	---

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kecermatan penggunaan satuan lingual dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Ketidaktepatan pilihan kata dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu penggunaan kosakata tidak baku, penggunaan kata bermakna jamak, penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna sama, penggunaan kata yang tidak tepat, penggunaan konjungsi korelatif yang salah, dan penggunaan verba berpreposisi yang salah. 1) Penggunaan kosakata tidak baku meliputi kesalahan ejaan (358) dan kesalahan ketik (3); 2) penggunaan kata yang boros (2); 3) penggunaan kata yang tidak tepat (20); 4) penggunaan konjungsi korelatif yang salah (8); dan 5) penggunaan verba berpreposisi yang salah (92).
- (2) Ketidakefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu ketidaklengkapan ditemukan (56), ketidakparalelan ditemukan (7), ketidakhematan ditemukan (44), ketidakpaduan ditemukan (8), dan ketidaklogisan ditemukan (20).
- (3) Kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Bambang. 2012. *Dasar-Dasar Kajian Wacana*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.s